

THE ANALYSIS OF TERRITORY FINANCIAL RATIO AS PERFORMANCE VALUE IN THE GOVERNMENT OF MAGELANG CITY**Salwa Qur'ani¹, Endang Kartini Panggiarti²**^{1&2}Universitas Tidarsalwaqurani6@gmail.com^{1*} dan endangkartini2504@gmail.com²**ABSTRACT**

This study aims to analyze the financial performance of the local government of the City of Magelang by using the analysis of independence ratios, effectiveness ratios, efficiency ratios, hardness ratios and growth ratios. The type of research in this research is quantitative. The data used in this study are secondary data in the form of the Magelang City Government Financial Statements for 2015-2019 which were obtained using documentation techniques. The results of this study indicate that the independence ratio of 38.73% is low / not independent, the effectiveness ratio of 110.85% is classified as effective, the efficiency ratio of 100.22% is classified as inefficient, the compatibility ratio / shopping activity is classified as inefficient. Operational expenditure ratio of 87.16% and capital expenditure ratio of 24.66% are classified as less harmonious, and growth ratio of 10.16% is classified as low. The implication of the results of this study is that the City of Magelang must continue to increase and optimize local revenue by managing unprocessed regional resources and the government must also be able to prioritize its allocation of funds in optimal budget and development spending.

Keywords: *Independence Ratio; Effectiveness And Efficiency; Persistence, Growth; Government Performance*

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PENILAIAN KINERJA PADA PEMERINTAHAN KOTA MAGELANG**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Magelang dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasihan dan rasio pertumbuhan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang tahun 2015 – 2019 yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian 38,73% tergolong rendah / tidak mandiri, rasio efektivitas 110,85% tergolong efektif, rasio efisiensi 100,22% tergolong tidak efisien, rasio keserasihan / aktivitas belanja tergolong tidak efisien. Rasio belanja operasional 87,16% dan rasio belanja modal 24,66% tergolong kurang harmonis, dan rasio pertumbuhan 10,16% tergolong rendah. Implikasi hasil penelitian ini adalah bahwa Kota Magelang harus terus meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara mengelola sumber daya daerah yang belum diolah selama ini dan pemerintah juga harus dapat mengprioritaskan alokasi dananya pada belanja ritum dan belanja pembangunan secara oprimal.

Kata Kunci: Rasio Kemadirian; Efektivitas Dan Efisiensi; Keserasihan; Pertumbuhan; Kinerja Pemerintah

PENDAHULUAN

Menurut Undang – Undang No 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah juga dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten/kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah memerlukan sistem keuangan yang baik untuk mengelola Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah selanjutnya disingkat APBD yang bersifat efisien dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Objek pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat. Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkan tercapainya laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif yaitu laporan keuangan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran, menilai kondisi hasil operasional, membantu tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.

Laporan keuangan perlu dianalisis untuk memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Pengukuran kinerja dapat dijadikan evaluasi dan digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah, efektifitas, efisiensi, keserasihan, dan pertumbuhan PAD.

Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Salah satunya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mengetahui apakah pemerintah Kota Magelang telah menjalankan pemerintahan secara mandiri, efektif, dan efisien berdasarkan analisis rasio keuangan, maka diambil judul “Analisis Rasio Keuangan Daerah sebagai Penilaian Kinerja pada Pemerintah Kota Magelang”.

TINJAUAN PUSTAKA

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2007) “PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Menurut Halim (2007) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\% \quad (1)$$

Tabel 1. Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0–25	Instruktif
Rendah	> 25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber : Halim (2007)

Menurut Hersey dan Blanchard (Halim, 2007) dikemukakan hubungan tentang pemerintahan pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu : Pola hubungan Instruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial), Pola hubungan konsultatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah, Pola hubungan partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan etonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat dan Pola hubungan delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Rasio Efektivitas

Rasio Efektifitas (Halim, 2007) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \quad (2)$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mahsun (2012), adalah: Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif, Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektifitas berimbang dan Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi (Halim, 2007) adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \quad (3)$$

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Presentasi Efisiensi
100 % Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahmud (2011)

Rasio Keserasihan / Aktivitas Belanja

Rasio keserasian (Halim, 2007) menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis keserasian belanja antara lain berupa : a) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja. Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah yaitu 60 – 90 persen. Analisis ini diukur dengan rasio belanja operasi yang rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \quad (4)$$

b) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \quad (5)$$

Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja pada Pemerintahan Kota Magelang (Salwa Qur'ani, Endang Kartini Panggiarti)

Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan (Halim, 2007) adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - \text{Realisasi Penerimaan } (X_n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } (X_n - 1)} \quad (6)$$

Penelitian Terdahulu

Berbagai peneliti mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa ahli antara lain Nanda, Paul dan Harijanto (2016) juga melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah dan hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Kutai Barat menunjukkan pertumbuhan positif, pertumbuhan dalam kemampuan penyelenggaraan desentralisasi dan ketergantungan pada pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, nilai efektivitas PAD yang sangat efektif dan yang efektif, perubahan kinerja keuangan yang wajar dan tingkat pendapatan yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam pengelolaan PAD.

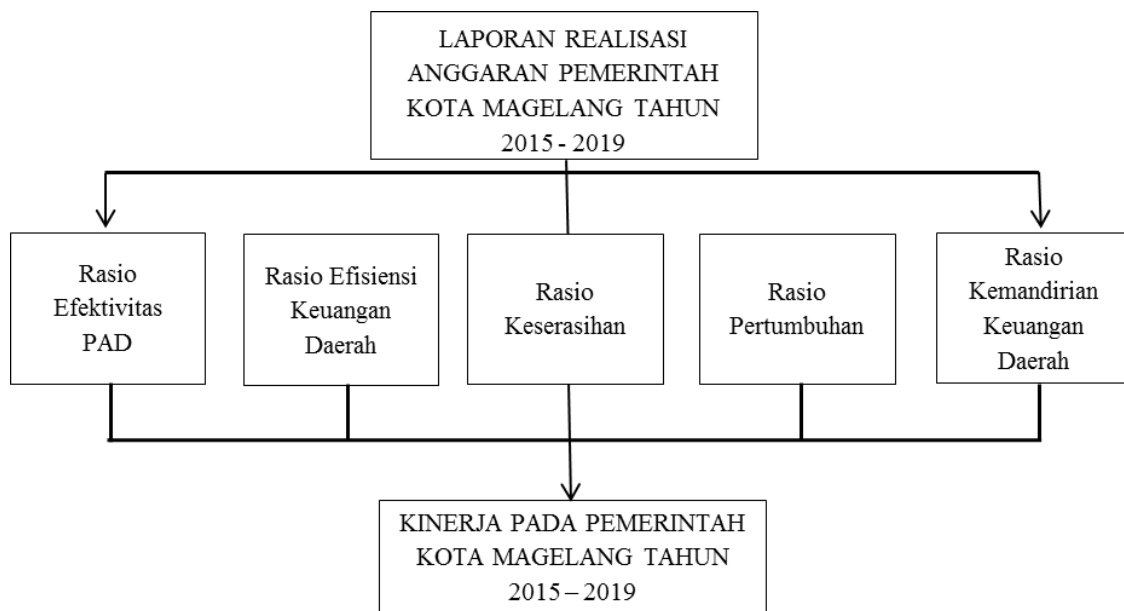
Rigel (2017) menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan rasio efektivitas PAD tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 131,8%, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah belum efisien karena selama lima tahun berturut turut skalanya di atas 100%, rasio Kerasihan masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya, Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif.

Nanik (2010) menunjukkan hasil bahwa rata – rata kinerja pengelolaan keuangan Kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Rata-rata realisasi PAD diatas 100,97%. Defisit anggaran dari tahun ke tahun juga semakin turun bahkan pada tahun 2006 Kota Malang mengalami surplus anggaran yaitu sebesar Rp 35.721.565.841,45. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Kota Malang seperti kemandirian keuangan Kota Malang yang masih rendah dan aktifitas pemerintah Kota Malang dalam membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin. Kinerja pengelolaan keuangan Kota Malang baik karena pemerintah Kota Malang mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Wita (2018) menunjukkan hasil bahwa Kinerja Keuangan BPPKAD Kota Surakarta dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dianggap tinggi yang termasuk dalam pola delegatif. Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kota Surakarta termasuk dalam kategori belum efektif sehingga harus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dinyatakan tidak efisien sehingga pemerintah Kota Surakarta harus mengurangi besarnya belanja yang dikeluarkan. Rasio Aktifitas/rasio kerasihan dianggap cukup baik, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam melakukan kegiatan kebutuhan pembangunan daerah tersebut. Rasio Pertumbuhan secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan sehingga membuat kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Kota Surakarta. Sebaiknya Pemerintah Kota Surakarta memperbaiki 4 rasio yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktifitas, dan rasio pertumbuhan.

Lazyra (2016) menunjukkan hasil bahwa kinerja pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan, dan meningkatnya belanja daerah, bahkan melebihi dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, rasio kemandirian yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya pemerintah daerah Kota Medan dalam meningkatkan PAD, untuk rasio efektivitas yang masih dibawah standar terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target untuk pendapatan daerah tersebut, untuk rasio efisiensi yang berada diatas standar terjadi dikarenakan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Halim (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Rasio Kemandirian.

Hasil penelitian Rigel (2017) menjelaskan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan daerah selama lima tahun pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan imstruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, karena masih tergolong interval 0-25%

H1 : Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap penilaian kinerja pada pemerintah Kota Magelang

Halim (2007) menyatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Hasil penelitian Nanda, Paul, dan Harijanto (2016) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang Sangat Efektif pada periode Tahun 2011 dan periode Tahun 2013 dan nilai efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang Efektif pada periode Tahun 2012 dan periode Tahun 2014.

H2 : Rasio efektivitas berpengaruh terhadap penilaian kinerja pada pemerintah Kota Magelang

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Madiasmo (2013) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Hasil penelitian Wita (2018) Rasio Efisiensi di Kota Surakarta menunjukkan bahwa rasio rata-rata sebesar 377,79% yang terletak lebih dari (>100) artinya dinyatakan tidak efisien. Dengan meningkatnya rasio efisien pendapatan daerah, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang di keluarkan Pemerintah.

H3 : Rasio efisiensi berpengaruh terhadap penilaian kinerja pada pemerintah Kota Magelang

Rasio keserasihan menggambarkan bagaimana pemerintah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan secara optimal. Menurut Madiasmo (2012) semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti presentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomu masyarakat cenderung semakin kecil.

Hasil penelitian Lazyra (2016) menunjukkan bahwa Untuk tingkat rasio keserasihan yang diukur dari rasio belanja modal untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. Untuk pengeluaran dana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 masih dapat dikatakan cukup baik, hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan pembangunan daerah tersebut.

H4 : Rasio keserasihan berpengaruh terhadap penilaian kinerja pada pemerintah Kota Magelang

Menurut Mahmud (2010) rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Hasil penelitian Nanik (2010) menunjukkan bahwa pertumbuhan APBD Kota Malang pada tahun 2004 – 2006 menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan tersebut disebabkan karena meningkatnya realisasi pos – pos PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

H5 : Rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap penilaian kinerja pada pemerintah Kota Magelang

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak – pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut: DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor (Halim 2007).

Hasil penelitian Lazyra (2016) menjelaskan bahwa kinerja Pemerintah daerah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah untuk tahun 2011 – 2015 mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak tercapainya target atas penerimaan PAD Kota Medan, selain itu juga besarnya dana sumbangan yang diberikan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Medan, dan juga besarnya jumlah belanja daerah, bahkan belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut.

METODE PENELITIAN**Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono 2012 dikatakan metode kuantitatif data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Sumber yang digunakan adalah data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan dari berbagai sumber, yang berupa data dokumentasi dan arsip – arsip resmi.

Populasi dan Sampel

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap yang paling tahu tentang sesuatu yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek / situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2015).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan – catatan dan dokumen dengan menggunakan metode dokumentasi. Data sekunder yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari BPKAD Kota Magelang yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kota Magelang tahun anggaran 2015 – 2019.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan – perhitungan terhadap keuangan yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolak ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasihan, dan Rasio Pertumbuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2015	186.677.410.081	579.662.287.639	32,21	Konsultatif
2016	220.315.848.702	567.636.707.545	38,82	Konsultatif
2017	233.557.714.356	553.115.007.612	42,23	Konsultatif
2018	249.873.268.826	635.493.984.912	39,32	Konsultatif
2019	273.430.616.133	666.093.310.877	41,05	Konsultatif
Rata-rata			38,73%	

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan Kota Magelang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2015 sebesar 32,21% naik menjadi 38,82% di tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 42,23%. Namun pada tahun 2018 Rasio Kemandirian mengalami penurunan sebesar 39,32% lalu pada tahun 2019 Rasio Kemandirian mengalami kenaikan.

Rasio Efektivitas

Hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Analisis Rasio Efektivitas

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2015	186.677.410.081	152.805.995.000	112,17	Efektif
2016	220.315.848.702	197.465.478.000	111,57	Efektif
2017	233.557.714.356	218.085.185.000	107,09	Efektif
2018	249.873.268.826	225.916.332.000	110,60	Efektif
2019	273.430.616.133	242.404.296.000	112,80	Efektif
Rata-rata			110,85	Efektif

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa rasio efektifitas Kota Magelang pada tahun 2015 sebesar 112,17%, tahun 2016 sebesar 111,57%, tahun 2017 sebesar 107,09%, tahun 2018 sebesar 110,60% dan tahun 2019 sebesar 112,80%.

Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan tentang realisasi belanja dan realisasi pendapatan, maka diperoleh hasil rasio efisiensi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Analisis Rasio Efisiensi

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2015	736.340.437.750	781.335.799.509	94,25	Kurang Efisien
2016	871.859.130.603	840.042.626.525	103,79	Tidak Efisien
2017	879.408.181.447	909.525.862.920	96,69	Kurang Efisien
2018	937.339.746.423	908.085.351.541	103,23	Tidak Efisien
2019	994.945.773.787	967.633.518.225	103,14	Tidak Efisien
Rata-rata			100,22	

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa efisiensi pengelolaan keuangan di Kota Magelang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 dan 2017 di bawah 100% yaitu sebesar 94,25% dan 96%. Sedangkan pada tahun 2016, 2018 dan 2019 mengalami peningkatan diatas 100% yaitu sebesar 103,79%, 103,23% dan 103,14%.

Rasio Keserasihan / Aktivitas Belanja

Hasil perhitungan rasio belanja operasi dan rasio belanja modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang merupakan bagian dari rasio keserasihan belanja.

Tabel 6. Analisa Rasio Belanja Operasi

Tahun Anggaran	Total Belanja Operasi (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2015	593.964.588.745	736.340.437.750	80,67
2016	649.227.700.687	871.859.130.603	134,30
2017	646.206.480.275	879.408.181.447	73,49
2018	699.921.003.430	937.339.746.423	74,68
2019	722.959.832.083	994.945.773.787	72,67
Rata-rata			87,16

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, sejak tahun 2017, pemerintah Kota Magelang mengalami fluktuasi rasio belanja operasi. Namun telah menunjukkan adanya upaya untuk menurunkan rasio belanja operasi. dari tahun 2015 sebesar 80,67% kemudian meningkat hampir 50% menjadi 134,30%, kemudian melakukan kebijakan ketat dan akhirnya turun 69% menjadi 73,49%. Sempat naik 1% di tahun 2018, namun kembali turun sekitar 2% menjadi 72,67% ditahun 2019.

Tabel 7. Analisa Rasio Belanja Modal

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2015	141.308.934.005	736.340.437.750	19,20
2016	221.924.457.916	871.859.130.603	25,46
2017	233.070.956.632	879.408.181.447	25,98
2018	237.418.742.993	937.339.746.423	25,33
2019	271.984.161.704	994.945.773.787	27,34
Rata-rata			24,66

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio belanja modal sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Berawal dari rasio 19,20% sampai dengan 27,34%, peningkatan cukup signifikan, yaitu tahun 2015 meningkat 6%, kemudian stabil selama 3 tahun, dan kemudian meningkat 2%. Walaupun kecil namun peningkatan ini menunjukkan adanya upaya untuk menekan belanja modal dibandingkan realisasi belanja daerah.

Rasio Pertumbuhan

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan Pemerintah Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Analisis Rasio Pertumbuhan PAD

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio Pertumbuhan PAD
2015	186.677.410.081	-
2016	220.315.848.702	18,02%
2017	233.557.714.356	6,12%
2018	249.873.268.826	6,99%
2019	273.430.616.133	9,43%
Rata-rata	-	10,15%

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa dengan melihat rasio pertumbuhan yang dihasilkan Kota Magelang sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan selama 4 tahun, namun kemudian meningkat hampir 2,5% di tahun 2019.

Pembahasan

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan hasil analisis keuangan daerah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Analisis Rasio Keuangan

Jenis rasio	Rata-rata rasio (%)	Keterangan
Rasio kemandirian	38,73%	Rendah
Rasio efektifitas	110,85%	Efektif
Rasio efisiensi	100,22	Tidak efisien
Rasio keserasian belanja		Kurang serasi
Rasio belanja operasi	87,16	
Rasio belanja modal	24,66	
Rasio pertumbuhan	10,15	Rendah

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan perhitungan hasil analisis keuangan daerah di Kota Magelang yang digunakan sebagai dasar menilai kinerja pemerintah Kota Magelang maka disimpulkan bahwa pemerintah Kota Magelang untuk Rasio Kemandirian rata – rata rasio sebesar 38,73%. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah masih rendah dan berpola konsultatif. Artinya kemampuan keuangan daerah Kota Magelang dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah sudah mulai berkurang karena daerah Kota Magelang dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Hasil penelitian Rigel (2017) menunjukkan bahwa Rasio kemandirian keuangan daerah selama lima tahun pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki rata – rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif, yaitu peran pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, karena masih tergolong interval 0 – 25%. Artinya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Rasio Efektivitas di Kota Magelang untuk tahun 2015 – 2019 tergolong efektif karena hasil menunjukka di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah di Kota Magelang sudah efektif karena mampu merealisasikan anggaran PAD di atas anggaran PAD yang telah ditetapkan. Hasil penelitian Nanda (2016) nilai efektifitas pada BPKAD Kabupaten Kutai Barat menunjukkan bahwa pada periode 2011 , 2013 dan 2014 dikategorikan efektif sedangkan di tahun 2014 tidak efektif.

Rasio Efisiensi di Kota Magelang pada tahun 2015 – 2019 tergolong kriteria tidak efisien karena presentasi efisiensi menunjukkan angka >100% yaitu sebesar 100,22%. Hasil penelitian Wita (2018) menunjukkan bahwa di Kota Surakarta dengan rata – rata rasio sebesar 377,184% yang terletak lebih dari (>100%). Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kota Magelang dan Kota Surakarta masih buruk dalam rasio efisiensi karena belum dapat menekankan jumlah belanja daerahnya.

Rasio Keserasihan yang bersumber dari rasio belanja operasional dan rasio belanja modal menunjukkan bahwa rata – rata rasio sebesar 87,16% dan 24,66%. Hasil penelitian Lazyra (2016) di Kota Medan menunjukkan hasil bahwa untuk belanja daerah tahun 2011 – 2014 mengalami penurunan, ditahun 2015 mengalami peningkatan. Sedangkan rasio belanja modal pada tahun 2011 – 2013 mengalami penurunan, dan di tahun 2014 – 2015 mengalami peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa rasio belanja daerah di Kota Magelang dan Kota Medan menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil.

Rasio Pertumbuhan Kota Magelang untuk tahun 2015 – 2019 mengalami penurunan selama 4 tahun kemudian meningkat hampir 2,5% di tahun 2019. Namun rata – rata rasio pertumbuhan menunjukkan hasil sebesar 10,5% atau dapat dikategorikan rendah. Sedangkan hasil penelitian (Nanik 2010) menunjukkan bahwa pertumbuhan APBD Kota Malang pada tahun anggaran 2004 – 2005 menunjukkan pertumbuhan positif. Terutama pertumbuhan pendapatan, yang pada tahun 2005 sebesar 16,31% dan pada tahun 2006 sebesar 33,16%. Pertumbuhan pendapatan di Kota Malang pada tahun 2006 merupakan pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya karena meningkatnya pendapatan dari DAK.

PENUTUP

Penelitian ini menguji pengaruh analisis rasio keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Magelang dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasihan, dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan rata – rata kinerja keuangan daerah cukup baik. Terlihat dari Rasio Kemandirian keuangan daerah masih rendah dan berpola konsultatif. Artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena Kota Magelang dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Ditinjau dari Rasio Efektivitas pemerintah Kota Magelang sudah efektif karena mampu merealisasikan anggaran PAD di atas anggaran PAD yang telah ditetapkan, artinya pemerintah Kota Magelang mampu mewujudkan dan mengupayakan PAD dari target yang ditetapkan di anggaran pemerintah Kota Magelang. Rasio Efisiensi pada Pemerintah Kota Magelang masih belum mampu menekan belanja yang begitu besar dan kurang sebanding dengan pendapatan yang diterimanya. Bahkan belanja pemerintah Kota Magelang melampaui pendapatan yang diterima. Rasio Keserasihan yaitu rasio belanja operasi dan belanja modal, pemerintah Kota Magelang menunjukkan adanya upaya untuk menekan belanja yang bersumber dari belanja

operasional dan belanja modal terhadap belanja daerah. Hasil analisis keserasian yang bersumber dua rasio ini menunjukkan bahwa rata-rata rasio belanja operasional adalah 87,16%, sedangkan rata-rata rasio belanja modal adalah 24,66%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rasio belanja operasional masih jauh lebih besar dibandingkan rasio belanja modal dan belum mencapai keserasian belanja. Sedangkan Rasio Pertumbuhan pada pemerintah Kota Magelang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Implikasi dalam bidang praktis yaitu berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang berdasarkan analisis rasio keuangan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian keuangan daerah masih rendah dan berpola konsultatif dengan rata – rata rasio sebesar 38,73%. Dimana tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Magelang pada tahun 2015 – 2017 mengalami kenaikan dan di tahun 2018 mengalami penurunan, namun di tahun 2019 Kota Magelang dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Rasio Efektifitas menunjukkan di atas 100% yaitu sebesar 110,85%. Hal ini menunjukkan bahwa Rasio Efektifitas di Kota Magelang sudah efektif. Rasio Efisiensi tergolong kriteria kurang efisien karena presentase efisiensi menunjukkan angka 90% - 100% dengan rata – rata rasio sebesar 100,22%. Rasio Keserasian yang bersumber dari belanja operasi dan belanja modal menunjukkan rata – rata sebesar 87,16% dan 24,66%. Rasio Perumbuhan mengalami penurunan selama 4 tahun, namun kemudian meingkat di tahun 2019. Dari penjelasan diatas Pemerintah Daerah Kota Magelang dari tahun 2015 - 2019 meningdikasikan bahwa Kota Magelang harus terus meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara mengelola sumber daya daerah yang belum diolah selama ini dan pemerintah juga harus dapat mengprioritaskan alokasi dananya pada belanja ritun dan belanja pembangunan secara oprimal.

Sebaiknya Pemerintah Kota Magelang mampu memaksimalkan Penndapatan Asli Dearah (PAD) agar tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Belanja rutin sebaiknya ditekan dan belanja modal lebih ditingkatkan dalam pembangunan infrastruktur daerah. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Kota Magelang agar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kota Magelang.

DAFTAR RUJUKAN

- Apri. (2017). ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 - 2015). *Artikel Skripsi*, Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- BPKAD KOTA MAGELANG. (2020). *BPKAD KOTA MAGELANG*. Dipetik 2020, dari BPKAD KOTA MAGELANG: <http://bpkad.magelangkota.go.id/>
- Chandrarin , G. (2017). *METODE RISET AKUNTANSI (Pendekatan Kuantitatif)*. Jakarta : Salemba Empat .
- Christin , Sri, & Joy. (2017). ANALISIS KINERJA PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TOMOHO. *Jurnal EMBA*, 745 - 752.
- Elizar, & Kiki. (2016). ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* .
- Fitri, & Tutik. (2014). ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PENILAIAN KINERJA (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang). *JABPI*, 143 - 156.
- Freddy. (2019). *Analisis Laporan Keuangan SEKTOR PUBLIK*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA .
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat .
- Hariati. (2017). ANALISIS RASIO KEMAMPUAN, KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKANBARU. *JOM Fekon* , 132 - 146.
- Lazyra . (2016). *ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN (SKRIPSI)*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Liantino, W. (2018). *ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ASET DAERAH (BPPKAD) DI KOTA SURAKARTA*. Surakarta : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.
- Madiasm. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan* . Bandung: Pustaka Setia.
- Nanda , Paul, & Harijanto. (2016). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR (STUDI PUSTAKA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI BAEAR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 - 2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 624 - 634.
- Nurul, R. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *EBBANK*, 33 - 48.
- Rahmayati , A. (2016). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2011 - 2013. *Jurnal EKA CIDA*, 40 - 54.
- Rizky, P. (2015). *ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009 - 2013*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.

- Rizky, P. (2015). *ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009 - 2013 (SKRIPSI)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sandy, I Wayan, & Fridayana. (2018). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANATAHUN . *Bisma : Jurnal Manajemen* , 136 - 145.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua) EDISI PERTAMA*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. Bandung : ALFABETA.
- Wahyuni, N. (2010). ANALISI RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MALANG . *EL MUHASABAH: Jurnal Akuntansi* , 1 - 18.
- Yulita, & Aris. (2018). ANALISIS KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA METRO. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 34 - 46.
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR. *Ekombis Review*, 187 - 195.